

PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM STUDI KASUS DIKOTA PONTIANAK

Ratu Santana Dewi Pertiwi Sianipar¹; Wukuf Dilvan Rafa²; Haryono³

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak Kalimantan Barat
E-mail : ratusianipar91@gmail.com

diterima: 22/5/2024; direvisi: 23/6/2024; diterbitkan: 26/9/2024

Abstract: UMKM are one of the economic activities that Indonesian people always encounter and carry out. Even though UMKM have contributed to realizing a sustainable national economy, in reality there are many challenges that UMKM owners have to face, one of the challenges is in preparing financial reports. This research aims to find out whether UMKM in the city of Pontianak carry out accounting records in accordance with the standards that apply to UMKM, namely SAK EMKM. This study used descriptive qualitative method. Primary data was obtained by researchers directly by distributing questionnaires. The research results show that the application of SAK EMKM to UMKM in Pontianak is still minimal, this is due to the low level of knowledge of SAK EMKM owners regarding SAK EMKM

Keywords: *Financial reports, SAK EMKM, UMKM*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia juga masuk kedalam kategori negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia ini juga mendukung permintaan produk. Semakin banyak permintaan produk dipasar, maka semakin banyak penduduk yang ingin menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Bisnis di negara Indonesia semakin berkembang dengan pesat (Nuvitasari et al., 2019). Pada tahun 2023 Indonesia masuk kedalam bagian negara yang memiliki nilai ekonomi terbesar. Indonesia meraih peringkat ke-16 dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 1,4 triliun US dollar atau setara dengan 1,4% dari total PDB global (Adi Ahdiat, 2023). UMKM menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang selalu dijumpai dan dijalankan masyarakat Indonesia. UMKM berperan dalam mendukung perekonomian nasional yakni sebesar 99,9% dan dapat menyerap tenaga kerja 97%.

UMKM diatur dalam undang-undang no. 20 tahun 2008 dan dijelaskan bahwa UMKM dibagi atas beberapa

kategori yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang tujuannya untuk meningkatkan usaha dan mendukung perekonomian nasional Indonesia didasari atas asas demokrasi ekonomi yang adil. UMKM juga menjadi penggerak perekonomian negara Indonesia yang dapat memberikan kontribusi untuk perluasan kesempatan kerja dengan mengurangi tingkat PDB dan menjadi alat bagi pemerintah dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM berkontribusi di negara Indonesia dan berjalan secara beriringan di era digital sehingga tidak hanya dari segi teknologi mesin namun, dari segi teknologi informasi seperti internet maupun aplikasi harus terus dikembangkan. Maka dari itu, UMKM harus bisa menyesuaikan dan mampu bersaing untuk dapat mengambil setiap potensial yang ada agar bisa selalu berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong akuntansi untuk berperan dalam membantu pencatatan laporan keuangan. Pelaku UMKM sering kali menilai bahwa usahanya berhasil karena dapat mencapai pendapatan yang lebih daripada pendapatan

di periode yang lalu. Padahal indikator pencapaian tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah pendapatan, namun diperlukan pengukuran serta pengelompokkan transaksi serta pengikhtisaran dari transaksi yang ada. Dari kondisi tersebut untuk mempermudah UMKM dalam menerapkan pencatatan akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar sederhana yang diperuntukkan khusus kepada UMKM yaitu SAK EMKM. Walaupun UMKM telah berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berkesinambungan dalam kenyataannya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemilik UMKM, salah satu tantangannya adalah dalam menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan UMKM itu sendiri.

Tingkat potensi UMKM yang tinggi dalam perkembangan perekonomian nasional negara Indonesia tidak diseimbangkan dengan kualitas UMKM. Informasi yang relevan yang bersumber dari laporan keuangan dapat mempermudah pemilik UMKM dalam mengevaluasi kondisi usahanya, sehingga UMKM yang dijalankan lebih berkualitas dan hal tersebut berdampak baik bagi UMKM. Permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM adalah dalam pencatatan serta penyusunan bagian-bagian laporan keuangan yang dapat dikategorikan masih sederhana. Ketersediaan catatan yang tidak lengkap serta tidak relevan akan memberikan dampak yang buruk dalam pelaksanaan evaluasi kinerja UMKM.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nuvitasari et al., 2019), meneliti mengenai implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh salah satu UMKM di Bayuwangi yaitu UD.Karya Tangi Banyuwangi masih terbilang sederhana dan tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan bagi UMKM yaitu SAK

EMKM. Hal ini juga disebabkan karena pemilik UD.Karya Tangi Banyuwangi tidak memiliki penguasaan pemahaman mengenai SAK EMKM. Sedangkan dalam penelitian Kalsum et al., (2020) mengenai penerapan SAK EMKM pada salah satu UMKM di kota Makasar menyatakan bahwa pada saat menyusun laporan keuangan, pemilik UMKM belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM.

Hal ini dikarenakan pemilik entitas tidak mendapatkan informasi dari sosialisasi oleh pemerintah, latar belakang pendidikan pemilik UMKM yang masih minim, tidak berjalannya aturan secara ketat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan SAK EMKM, kurangnya pemahaman pemilik UMKM mengenai SAK EMKM, kurang adanya pelatihan mengenai SAK EMKM, kurangnya biaya untuk merekrut staf ahli untuk menyusun laporan keuangan, fasilitas yang masih rendah, serta pemilik UMKM yang masih kurang dalam mengawasi laporan hasil akhir usahanya. Kemudian, dalam penelitian Utari et al., (2022), yang meneliti penerapan SAK EMKM pada UMKM yang ada di kota Tanjungbalai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM di kota Tanjungbalai masih sedikit, serta para pemilik UMKM di kota Tanjungbalai kurang mengetahui penerapan SAK EMKM.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti termotivasi untuk meneliti penerapan SAK EMKM pada UMKM yang ada di kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan kota yang memiliki ruang lingkup oleh pemilik usaha yang termasuk kedalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah kota Pontianak selalu berupaya untuk mendukung para pemilik UMKM dengan memberikan dana bantuan kepada UMKM secara merata dengan tujuan supaya UMKM semakin berkembang. Sampai dengan September 2023 jumlah UMKM di kota Pontianak yang terdaftar mencapai 2.003 UMKM. Oleh karena itu, peneliti terdorong

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Pontianak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah UMKM yang ada di kota Pontianak melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi UMKM yaitu SAK EMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan merupakan rangkaian penyajian yang disusun secara terstruktur mulai dari laporan posisi keuangan sampai kepada laporan kinerja keuangan suatu entitas. Manajemen akan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam aktivitas bisnis dengan menggunakan laporan keuangan (Amir Hasan dan Gusnardi, 2018). Laporan keuangan entitas bisnis juga dapat menggambarkan nilai perusahaan, karena informasi dari laporan keuangan bisa mencerminkan apakah perusahaan baik atau tidak. Laporan keuangan juga dibuat agar bisa memperlihatkan informasi yang dapat digunakan oleh pihak eksternal maupun pihak internal suatu entitas bisnis. Laporan keuangan harus berisi informasi yang relevan dan representatif. Informasi keuangan yang relevan dan representatif didalam laporan keuangan entitas bisnis dapat mempermudah pemilik UMKM untuk meninjau kondisi usaha, sehingga usaha yang dijalankan oleh entitas bisnis lebih berkualitas.

SAK EMKM diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari, tahun 2018. SAK EMKM dikeluarkan sebagai standar yang dapat berdiri sendiri dan ditunjukkan khusus untuk entitas bisnis yang sesuai dengan kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang signifikan dan telah diatur kedalam SAK ETAP. SAK EMKM dirancang dengan lebih sederhana, SAK EMKM mengatur aktivitas transaksi bersifat umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukuran yang diterapkan adalah biaya historis, sehingga EMKM hanya perlu

mencatat pelaporan aset dan liabilitas sesuai dengan biaya perolehan (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Laporan keuangan lengkap bagi EMKM berdasarkan SAK EMKM terdiri dari beberapa bagian yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan.

UMKM dapat didefinisikan sebagai aktivitas usaha yang dikelola langsung oleh satu orang atau lebih yang berupa badan usaha dengan ruang lingkup yang kecil atau biasa kita kenal dengan sebutan mikro (Istinasari et al., 2021). Menurut undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, UMKM dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. **Usaha Mikro**, merupakan bentuk usaha yang produktif dan dimiliki oleh satu orang atau berupa badan usaha atas satu orang dengan total aset bersih senilai 50 juta, serta hasil penjualan tahunan senilai 300 juta
2. **Usaha Kecil**, merupakan bentuk usaha yang didirikan sendiri dan bersifat ekonomi produktif, serta dikelola oleh satu/dua orang atau berupa badan usaha yang tidak menjadi bagian anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah aset bersih diatas 50 juta s.d 500 juta, serta hasil penjualan tahunan senilai 300 juta s.d 2,5 miliar
3. **Usaha Menengah**, hampir sama dengan usaha kecil. Hanya jumlah aset bersih dari usaha menengah mencapai angka 2,5 miliar s.d 50 miliar.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2008) salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran serta melakukan analisis terhadap suatu fenomena. Target sampel yang akan digunakan peneliti adalah berdasarkan jumlah UMKM yang terdaftar

pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan kota Pontianak di bulan September 2023 adalah sebanyak 2.003 (Dinas Koperasi, n.d.). Dari data tersebut peneliti menggunakan metode purposive sampling, dengan data sampel yang diambil adalah sebanyak 50 UMKM. Penelitian ini menggunakan data yang berupa data primer. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari pemilik UMKM yang ada di kota Pontianak dengan cara menyebarkan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SAK EMKM pada UMKM yang ada di kota Pontianak masih terbilang minim. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah dikumpulkan. Dari hasil data yang telah dikumpulkan yaitu 50 pemilik UMKM terbukti hanya terdapat 8 UMKM saja yang mencatat laporan keuangannya sesuai dengan SAK EMKM.

Tabel 4. 1 Penerapan SAK EMKM pada UMKM di kota Pontianak

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	Menerapkan	8	16%
2	Tidak menerapkan	42	84%
	TOTAL	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Pengetahuan akan adanya standar khusus yang diperuntukkan bagi UMKM yang telah ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2018 masih asing bagi para pemilik UMKM di kota Pontianak. Hanya terdapat 13 pemilik UMKM yang mengetahui adanya SAK EMKM dan sisanya yaitu 37 pemilik UMKM tidak pernah mengetahui adanya SAK EMKM. Salah satu responden yaitu pemilik dari toko kacamata menyatakan *“Saya dulu juga mahasiswa jurusan akuntansi dek, namun sekarang saya mengelola usaha sendiri jadi tidak pernah mengetahui adanya standar baru seperti SAK EMKM”* (Suyoto, 2024). Sedangkan dari salah satu responden yaitu dari pemilik bengkel motor yang mengetahui adanya standar khusus bagi UMKM menyatakan

“Untuk SAK EMKM saya tahu kak, karena pernah mendengar dari seorang mahasiswa yang juga pernah menjadikan bengkel saya sebagai objek dari penelitiannya. Namun untuk menerapkannya di tempat usaha saya masih belum karena saya rasa masih belum diperlukan” (Harianto, 2024)

Tabel 4. 1 Pengetahuan akan SAK EMKM

No	Kriteria	Frekuensi (Persentase)		
		Mengetahui SAK EMKM	Mengenal SAK EMKM	Mempelajari SAK EMKM
1	Ya	13 (26%)	11 (22%)	9 (18%)
2	Tidak	37 (74%)	39 (78%)	41 (82%)
	TOTAL	100%	100%	100%

Sumber : 2 Data primer diolah, 2024

Padahal SAK EMKM sendiri telah diberlakukan sejak tahun 2018 lalu namun informasinya masih belum sampai secara merata kepada para pemilik UMKM. Dari data yang telah diperoleh hanya 13 responden yang mengenal SAK EMKM hanya 9 pemilik UMKM saja yang mempelajari standar yang berlaku khusus bagi UMKM.

Tabel 4. 3 Pengetahuan akan pencatatan akuntansi

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	Ya	46	92%
2	Tidak	4	8%
	TOTAL	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Akuntansi menjadi suatu kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas pencatatan akan setiap transaksi yang dilakukan untuk kepentingan operasional suatu usaha. Banyak dari responden yaitu pemilik UMKM yang mengetahui tentang pencatatan akuntansi. Sebanyak 92% responden mengetahui akan pencatatan akuntansi. Hal ini didukung dari latar belakang para responden yang rata-rata sudah mengetahui tentang akuntansi pada masa sekolah. Salah satu responden yaitu dari pemilik toko sembako menyatakan *“waktu saya masih SMA dan kebetulan saya juga dari jurusan akuntansi, jadi tentunya saya tahu dan pernah mempelajari dasar dari akuntansi dek”* (Vincent, 2024)

Tabel 4. 2 Kendala dalam menyusun laporan keuangan

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	Ya	29	58%
2	Tidak	21	42%
	TOTAL	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Untuk laporan keuangan, para pemilik UMKM merasa bahwa pencatatan yang detail sampai terancang menjadi sebuah laporan keuangan hanya diperlukan bagi perusahaan-perusahaan besar, karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan karyawan diluar pemilik itu sendiri dan juga karyawan yang kompeten dalam bidang akuntansi. Salah satu responden yaitu dari pemilik toko elektornik mengungkapkan “Kalau untuk usaha kecil seperti saya dek, tidak perlu membuat laporan keuangan. Karena bapak sendiri juga yang punya usaha. Untuk tahu apakah usaha bapak untung ataupun rugi bapak tinggal hitung-hitungan dari seilish uang modal bapak diawal dengan jumlah uang yang didapat dari pembelian pelanggan” (Kusno, 2024)

UMKM sebagai salah satu pendukung perekonomian nasional Indonesia sudah seharusnya diberikan perhatian lebih oleh pemerintah setempat. Pembekalan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan harus diberikan kepada para pemilik UMKM agar setiap usaha yang sudah terbentuk dapat semakin berkembang. Oleh karena itu, peneliti juga memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. Hasil menunjukkan hanya 8 responden saja yang pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah, 84% responden mendominasi bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi dari pemerintah terkait standar laporan keuangan bagi UMKM. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu hambatan bagi UMKM untuk dapat menerapkan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Tabel 4. 3 Sosialisasi SAK EMKM dari pemerintah

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	Ya	8	16%
2	Tidak	42	84%
	TOTAL	50	100%

Sumber : 5 Data primer diolah, 2024

Hasil pengolahan data primer berupa kuesioner yang telah disebarikan kepada para responden penelitian yaitu UMKM yang terdapat di kota Pontianak dilampirkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 Rangkuman jawaban para responden

No	Pertanyaan	Jawaban		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah saudara sebelumnya pernah mendengar tentang akuntansi ?	49	1	98%	2%
2	Darimana saudara mendengar tentang akuntansi?				
	a. Internet	7	0	14%	0%
	b. Sekolah	45	0	90%	0%
	c. Orang lain	4	0	8%	0%
	d. Tidak pernah	1	0	2%	0%
3	Apakah saudara pernah mendengar tentang pencatatan akuntansi ?	46	4	92%	8%
4	Apakah saudara melakukan pencatatan dari kegiatan jual beli yang saudara lakukan?	45	5	90%	10%
5	Darimana saudara melakukan pencatatan?				
	a. Elektronik/Software	20	0	40%	0%
	b. Ditulis	27	0	54%	0%
	c. Tidak menulis	3	0	6%	0%
6	Apakah saudara mengumpulkan struk/bukti dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh kegiatan usaha saudara?	40	10	80%	20%
7	Apakah saudara membedakan antara uang untuk kepentingan penjualan dan uang untuk kepentingan pribadi?	39	11	78%	22%
8	Komponen apa saja yang saudara pernah buat dalam laporan keuangan saudara?				
	a. Laporan Posisi Keuangan	13	37	26%	74%
	b. Laporan Laba Rugi	28	22	56%	44%
	c. Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal.K)	18	32	36%	64%
9	Apakah saudara menggunakan software dalam pembuatan laporan keuangan ?				
10	Apakah menurut saudara laporan keuangan itu penting?				
	a. Sangat penting	33	0	66%	0%
	b. Penting	17	0	34%	0%
	c. Tidak penting	0	0	0%	0%
11	Apakah tujuan anda dalam membuat laporan keuangan?				
	a. Internal: Pemilik dll	43	0	86%	0%
	b. Eksternal: Bank, Pemerintah, Kantor	7	0	14%	0%
12	Apakah pemerintah pernah memberikan sosialisasi mengenai SAK EMKM kepada UMKM saudara?	42	8	84%	16%
13	Apakah UMKM saudara pernah mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan?	29	21	58%	42%
14	Apakah saudara mengetahui SAK EMKM?	13	37	26%	74%
15	Apakah saudara mengenal SAK EMKM?	9	41	18%	82%
16	Apakah saudara mempelajari SAK EMKM?	10	40	20%	80%
17	Apakah UMKM saudara menerapkan laporan keuangan sesuai SAK EMKM?	8	42	16%	84%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Penerapan SAK EMKM pada UMKM yang ada di kota Pontianak masih terbilang minim. Pernyataan ini didukung dari data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dari hasil yang telah diperoleh yaitu terdapat 50 UMKM yang menjadi sumber data peneliti hanya 8 UMKM saja yang menerapkan SAK EMKM dalam kegiatan usaha merek, 84% UMKM lainnya tidak menerapkan standar pencatatan yang sesuai dengan standar yang telah diberlakukan secara khusus bagi UMKM yaitu SAK EMKM. Tidak banyak para pemilik UMKM yang ada di kota Pontianak mengetahui adanya standar ini. Hal ini kemudian

berdampak bagi pengetahuan para UMKM untuk menggunakannya.

Ketidaktahuan para pemilik UMKM akan standar ini juga dilatar belakangi karena mereka menganggap bahwa pencatatan akuntansi yang detail hanya dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah besar dan memiliki jumlah karyawan yang banyak. Para pemilik UMKM juga merasa cukup dengan pencatatan sederhana atas setiap transaksi yang terjadi pada usaha mereka. Hal ini juga didukung dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mencatat dengan detail setiap transaksi yang telah terjadi. Beberapa pemilik UMKM merasa bahwa dengan pencatatan sederhana yang telah mereka terapkan selama ini juga bisa menggambarkan kondisi usaha mereka. Dari pencatatan sederhana yang tetap dilakukan para pemilik UMKM menunjukkan bahwa para pemilik UMKM masih memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencatatan dari transaksi jual beli yang mereka lakukan.

SAK EMKM terdiri atas 3 jenis laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, CaLK. Dari 3 jenis laporan yang seharusnya disusun oleh para pemilik UMKM, hanya laporan laba/rugi saja yang banyak disusun para pemilik UMKM dengan persentase 74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemilik UMKM sadar akan pentingnya keberlangsungan usaha mereka dengan mengetahui apakah usaha mereka mengalami keuntungan atau kerugian. Dari hasil wawancara responden pada saat menyebarkan kuesioner sebenarnya para pemilik UMKM sangat menyadari bahwa laporan keuangan penting sekali untuk disusun.

Salah satu kendala dalam penerapan SAK EMKM adalah dari segi pendidikan. Pengetahuan pendidikan pada masa sekolah dapat para pemilik UMKM terapkan dalam kegiatan usaha mereka.

Namun, ditemukan hanya laporan laba/rugi saja yang paling banyak disusun oleh para pemilik UMKM itupun hanya dalam bentuk yang sederhana. Untuk 2 jenis laporan lainnya yaitu laporan posisi keuangan dan CaLK para pemilik UMKM tidak menyusunnya karena kurangnya pemahaman dan menurut para pemilik UMKM proses penyusunan laporan keuangan tersebut akan membuang-buang waktu.

Dalam teori yang dinyatakan oleh Roviante (2011), yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga hal ini mendukung bahwa salah satu kendala dalam penerapan SAK EMKM adalah karena kurangnya pengetahuan. Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Andari et al., 2022) yang menyatakan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Dari kendala yang dialami pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa solusi. Karena para pemilik UMKM yang ada di kota Pontianak didominasi oleh para pelaku usaha yang memang sudah sedari lama membangun usahanya, maka pemerintah disarankan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada para pemilik UMKM. Sehingga walaupun para pemilik UMKM kurang memiliki latar belakang pendidikan yang mempelajari ilmu akuntansi yang mendalam, para pemilik UMKM tetap dapat terbekali oleh sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Selain itu, solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu pelatihan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dirancang sesuai dengan standar yang berlaku. Aplikasi tersebut akan membantu para pemilik UMKM untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi. Hal ini juga telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasan Habibi et al., (2021)

yang melakukan penerapan aplikasi Si Apik pada usaha laundry. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa usaha laundry yang dijadikan sebagai objek setelah menerapkan aplikasi Si Apik dapat menghasilkan 3 jenis laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber informasi baik bagi pihak internal maupun eksternal usaha sebagai informasi keuangan yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang ada di kota Pontianak masih minim dalam menerapkan SAK EMKM. Hanya terdapat 16% dari 50 UMKM yang menerapkannya. Banyak pemilik UMKM tidak mengetahui tentang SAK EMKM dan kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah. Untuk mengatasi kendala ini, perlu ada peningkatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan dan keberlanjutan UMKM serta perekonomian nasional.

Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan studi perbandingan antara UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM dengan UMKM yang belum menerapkan SAK EMKM. Sehingga, kedepannya diharapkan penelitian tersebut dapat menjadi argumen yang kuat bahwa penerapan pencatatan yang sesuai standar akan berdampak baik bagi keberlangsungan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Ahdiat. (2023, December 13). Indonesia Masuk 20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Global 2023. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/13/indonesia->

[masuk-20-negara-dengan-ekonomi-terbesar-global-2023](#)

Amir Hasan dan Gusnardi. (2018). Prospek Implementasi Standar Akuntansi : Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018 (Per 1 Januari 2018). The Sadari Institute (SADARIPRESS).

Andari, A. T., Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ukuran Usaha dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. *Owner*, 6(4), 3680–3689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1109>

Dinas Koperasi, U. M. dan P. (n.d.). Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Pontianak. Retrieved March 31, 2024, from <https://ckan.pontianak.go.id/dataset/data-jumlah-umkm-di-kota-pontianak>

Hasan Habibi, L., Akuntansi, J., & Negeri Bandung, P. (2021). Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android SI APIK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Qaya Laundry). *Iyeh Supriatna. Indonesian Accounting Literacy Journal*, 01(03), 659–670.

Istinasari, C., Gele, E., Diah, N., Stie, A., & Surabaya, M. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM sebagai Sistem Pengembangan Kinerja Keuangan (Studi Kasus UMKM Fedcacare). In 599 *Media Mahardhika* (Vol. 19, Issue 3).

Kalsum, U., Ikhtiari, K., Dwiyantri, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Penerapan SAK EMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM di Food City Pasar Segar Kota Makassar. *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Manajemen, 3,
2684–9283.

<https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2>

- Nana Syaodih Sukmadinata. (2008).
Metode Penelitian Pendidikan.
PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuvitasari, A., Citra, N., & Martiana, N.
(2019a). Implementasi SAK
EMKM Sebagai Dasar
Penyusunan Laporan Keuangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). *International Journal
of Social Science and Business*,
3(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M.
(2022a). Penerapan SAK EMKM
Pada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. *Jurnal Ilmiah
Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 491–
498.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>
- Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M.
(2022b). Penerapan SAK EMKM
Pada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. *Jurnal Ilmiah
Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 491–
498.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>